

## ANALISIS STRATEGI DALAM UPAYA MENINGKATKAN KINERJA KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

*Agus Tri Sulistyoy<sup>1</sup>, Harianto<sup>2</sup>, A Faroby Falatehan<sup>3</sup>*

<sup>1</sup>Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

<sup>2</sup>Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

<sup>3</sup>Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

### ABSTRACT

*The mining sector is a leading sector that supports economic growth in the East Kalimantan region. However, the weakening of coal prices has led to economic sluggishness in East Kalimantan, even though the economic structure of East Kalimantan still relies on the mining sector. This condition has resulted in a decrease in the financial capacity of the local government, while the implementation of local government activities continues to increase. The measure of regional financial performance in implementing regional autonomy is by looking at the region's ability to finance development through Local Own-source Revenue (PAD) so that it no longer depends on central government funds in the form of Balance Funds. The general objective of this research is to formulate strategies to improve the Financial Performance of the East Kalimantan Provincial Government. The specific objective of this research is to develop strategic steps to improve the financial performance of the East Kalimantan Provincial Government using the Analytic Hierarchy Process (AHP). The strategy obtained from this research is to innovate services to increase PAD. Innovation is essential in public services because whatever the needs of the community, the East Kalimantan Provincial Government must respond quickly and accurately. Through innovation, it is hoped to be one of the ways to accelerate development effectively and efficiently.*

*Keywords: AHP, PAD, Financial Performance, Strategy*

### ABSTRAK

Sektor pertambangan merupakan sektor unggulan yang menopang pertumbuhan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur. Akan tetapi sejak melemahnya harga batubara, mengakibatkan perekonomian di Kalimantan Timur mengalami kelesuan, padahal struktur ekonomi Kalimantan Timur masih mengandalkan sektor pertambangan. Kondisi tersebut mengakibatkan menurunnya kemampuan pembiayaan Pemerintah daerah, sedangkan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah terus meningkat. Ukuran kinerja keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah dengan melihat kemampuan daerah membiayai pemabngunan melalui Pendapatan Asli Daerah sehingga tidak bergantung lagi dari dana pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan *Analysis Hierarchy Process* (AHP). Strategi yang diperoleh dari penelitian ini adalah dengan melakukan inovasi pelayanan untuk meningkatkan PAD. Inovasi menjadi sesuatu yang mutlak dalam pelayanan publik, sebab apapun kebutuhan masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus merespon dengan cepat dan tepat. Melalui inovasi diharapkan menjadi salah satu cara untuk mendorong percepatan pembangunan secara efektif dan efisien.

Kata Kunci: AHP, PAD, Kinerja Keuangan, Strategi

### PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah salah satunya diukur dari keberhasilan pembangunan ekonomi wilayah tersebut. Pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita masyarakat, tingkat

inflasi, kesempatan kerja dan banyak lagi tolok ukur-tolok ukur yang harus dipenuhi untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Keberhasilan tersebut harus berkelanjutan dan bersifat jangka panjang sehingga akan memberikan dampak signifikan

terhadap kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi menurut Arsyad (2005) dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara (wilayah) dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Secara ekonomi, kesejahteraan hidup masyarakat suatu negara bisa diukur melalui berbagai instrumen, seperti pertumbuhan ekonomi (*growth*), pendapatan per kapita (*per capita income*), dan Indeks Pembangunan Manusia (*human development index*). Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai apabila pembangunan yang dilaksanakan mengarah pada faktor-faktor yang menentukan kesejahteraan itu sendiri, dan pembangunan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh salah satunya yaitu adanya ketersediaan anggaran dalam keuangan negara atau keuangan daerah.

Menurut Sukirno (1996) pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu keberhasilan pembangunan. Sedangkan pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.

Sektor pertambangan yang merupakan sektor unggulan mampu menopang pertumbuhan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur. Akan tetapi sejak melemahnya harga batubara di tahun 2013, seiring dengan perlambatan ekonomi dunia yang menyeret turunnya harga minyak bumi dari level diatas US\$100 pada pertengahan tahun 2014 menjadi hanya US\$ 49 hampir di sepanjang tahun 2015. Batu bara bernasib serupa dengan penurunan harga yang signifikan dari harga rata-rata US\$70 di tahun 2014 menjadi sekitar US\$60 pada akhir tahun 2015.

Menurunnya kinerja pertambangan merupakan dampak dari perlambatan ekonomi

dunia termasuk di negara China sebagai mitra dagang utama Kalimantan Timur. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok terus mengalami perlambatan sejak tahun 2011, bahkan pada akhir tahun 2015 pertumbuhan ekonomi di China mencapai 6,9%. Perlambatan ini menyebabkan permintaan batubara China berkurang secara signifikan. Sebagai konsumen batubara terbesar di dunia, pengurangan permintaan batubara dari China berdampak pada berlimpahnya stok batubara dunia yang pada akhirnya menyebabkan harga komoditas batubara menjadi jatuh. Upaya China untuk menekan polusi udara dengan mengurangi penggunaan batubara serta masuknya batubara dari Afrika Selatan turut menekan harga batubara di pasar internasional.

Dengan melihat harga energi batubara di tingkat internasional, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan APBD, makapendekatan pengembangan ekonomi yang hanya bertumpu pada sektor pertambangan tidak dapat terus diandalkan dan kinerja keuangan Pemerintah daerah selalu dikaitkan dengan bagaimana unit kerja Pemerintah daerah dapat mencapai tujuan kerja dengan alokasi anggaran yang tersedia. Untuk itu perlu dilakukan sebuah kajian mengenai strategi peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pasca melemahnya sektor pertambangan batubara.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Tempat dan Waktu Penelitian

Kajian ini dilakukan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam dan sangat bergantung terhadap sektor pertambangan batu bara yang akan memberikan dampak apabila terjadi fluktuasi harga energi di tingkat internasional, sedangkan sumber pendapatan yang ada di tingkat provinsi sangat terbatas sehingga diperlukan strategi yang tepat. Penelitian dilaksanakan dari bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan, sedangkan data sekunder merupakan

data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui sumber-sumber yang sudah ada (Hasan 2002). Data primer diperoleh melalui survei dan wawancara dengan pihak yang kompeten mengenai kinerja keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan untuk menggali informasi yang relevan dengan tema pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Koentjoroningrat (1983) mengemukakan bahwa teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan, seperti koran, buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.

**Metode Analisis Data**

*Analytical Hierarchy Process (AHP)*

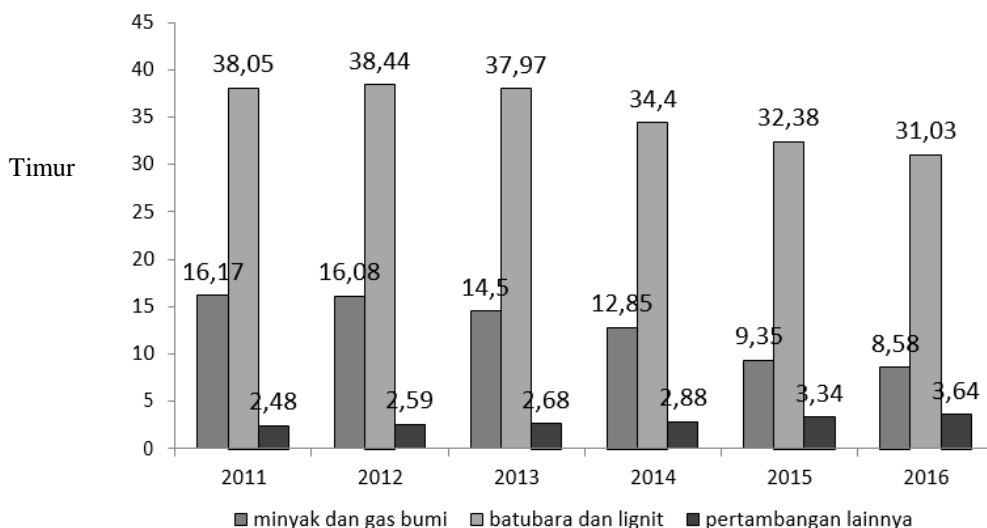
*Analytical Hierarchy Process* adalah salah satu bentuk model pengambilan keputusan yang pada dasarnya berusaha menutupi semua kekurangan dari model-model sebelumnya (Permadi 1992). Prinsip kerja AHP adalah menyederhanakan suatu persoalan kompleks yang tidak terstruktur, strategik, dan dinamik menjadi sebuah bagian-bagian dan tertata dalam sebuah suatu hirarki (Marimin 2010). Tingkat kepentingan suatu variabel diberi nilai numerik secara subjektif tentang arti penting variabel tersebut dan

secara relatif dibandingkan dengan variabel yang lain. Model AHP menggunakan persepsi manusia yang dianggap ahli (*expert*) sebagai input utamanya.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Kondisi Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur**

Salah satu indikator penting untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah berupa indikator-indikator ekonomi dapat dijadikan acuan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Indikator-indikator seperti PDRB, PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi merupakan ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk menilai kondisi ekonomi daerah. Potensi kekayaan alam di Provinsi Kalimantan Timur melimpah, yang berasal dari hasil hutan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan. Sektor pertambangan telah mampu menyumbang lebih dari 40% perekonomian di Kalimantan Timur. Sektor yang selama ini mampu menopang perekonomian Provinsi Kalimantan Timur yaitu sektor pertambangan dan penggalian ternyata mengalami penurunan apabila dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan tahun 2016  
 Gambar 1. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB ADHB Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011-2016 sedikit mengalami penurunan dibandingkan den memberikan kontribusi pada PDRB Kalimantan Timur.

Gambar 1 menggambarkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor terbesar dalam memberikan kontribusi pada PDRB Kalimantan Timur. Pada tahun 2016 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 43,34% dari nilai PDRB,

Pada tahun 2016 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 43,34% dari nilai PDRB, pertambangan dan penggalian tahun 2015 yaitu sebesar 45,16%.

**Perumusan Strategi Menggunakan *Analysis Hierarchy Process***

Metode yang digunakan dalam analisis AHP dilakukan melalui wawancara dan kuesioner. Pengolahan data hasil kuesioner dilakukan dengan menggunakan *software Expert Choice 11*. Rasio konsistensi terhadap pendapat responden berada di bawah 10%.

### **Tingkat Peranan Faktor dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur**

Hasil analisis AHP menunjukkan perbandingan antar elemen faktor berdasarkan *goal* meningkatkan kinerja kemandirian keuangan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu regulasi dengan nilai 0,294. Urutan selanjutnya berturut-turut adalah sumber daya manusia (SDM) dengan nilai 0,275, pengawasan dengan nilai 0,166, perencanaan dengan nilai 0,150 dan dukungan kelembagaan dengan nilai 0,114.

Faktor regulasi dipilih sebagai prioritas utama dibandingkan dengan faktor lainnya dikarenakan regulasi digunakan sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah yang bersangkutan dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) agar dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemberi amanat. Tujuan dari regulasi adalah untuk memastikan peraturan yang dibuat telah berjalan dengan efektif dan mewakili kepentingan publik (OECD 2011).

### **Tingkat Peranan Aktor dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.**

Dalam menentukan alternatif strategi dan keterkaitan antar strategi, diperlukan perbandingan antar unsur "aktor" berdasarkan "faktor" yaitu prioritas pertama adalah Pemerintah Provinsi dengan nilai 0,311. Prioritas kedua adalah BPKAD dengan nilai 0,225. Prioritas ketiga adalah Bappeda dengan nilai 0,157. Prioritas keempat yaitu Pemerintah Pusat dengan nilai 0,157, dan prioritas kelima adalah DPRD dengan nilai 0,150.

Pemerintah Provinsi dinilai memiliki kekuatan dan peluang yang lebih besar dibanding *stakeholder* lainnya dalam hal penentuan strategi meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur dengan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah agar pembangunan di daerah berjalan seiring dengan pembangunan pusat. Setiap daerah mempunyai potensi yang berbeda karena perbedaan kondisi ekonomi, sumber daya alam, besaran wilayah, tingkat pengangguran, dan besaran penduduk. Pemerintah Provinsi memiliki peran dalam hal tersebut melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu harus mampu mengelola sumber daya yang ada untuk dikelola secara maksimal sehingga pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat dapat meningkat.

### **Tingkat Peranan Kendala dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur**

Perbandingan antar elemen kendala berdasarkan pelaku yaitu pada urutan pertama adalah buruknya birokrasi dengan nilai 0,230. Kendala selanjutnya yaitu kurangnya koordinasi dengan nilai 0,217. Urutan ketiga, keempat, dan kelima secara berurutan adalah realisasi anggaran di akhir tahun dengan nilai 0,214, terbatasnya infrastruktur dengan nilai 0,192, dan kurang optimalnya pendapatan dengan nilai 0,146.

Kendala utama yang diperoleh dari hasil wawancara adalah tata kelola birokrasi yang buruk, struktur gemuk yang menghabiskan anggaran, hingga maraknya pungli di berbagai sektor pelayanan masih menjadi cermin wajah birokrasi di pemerintahan. Birokrasi yang buruk dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang suatu negara atau daerah. Keadaan yang umum terjadi adalah birokrasi gemuk dan pelayanan yang berbelit-belit tidak hanya mengganggu pemenuhan hak pelayanan publik tetapi juga membebani anggaran pemerintah.

### **Tingkat Peranan Strategi dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur**

Perbandingan antar strategi berdasarkan kendala adalah melakukan inovasi pelayanan sebagai urutan pertama dengan nilai 0,268. Kemudian secara berurutan diikuti oleh peningkatan kapasitas ASN dengan nilai

0,236, peningkatan komunikasi dengan nilai 0,188, peningkatan pengawasan dengan nilai 0,164, dan penerapan *reward punishment*

dengan nilai 0,144. Dari hasil analisis AHP, prioritas masing-masing level dapat dilihat pada Gambar 2.

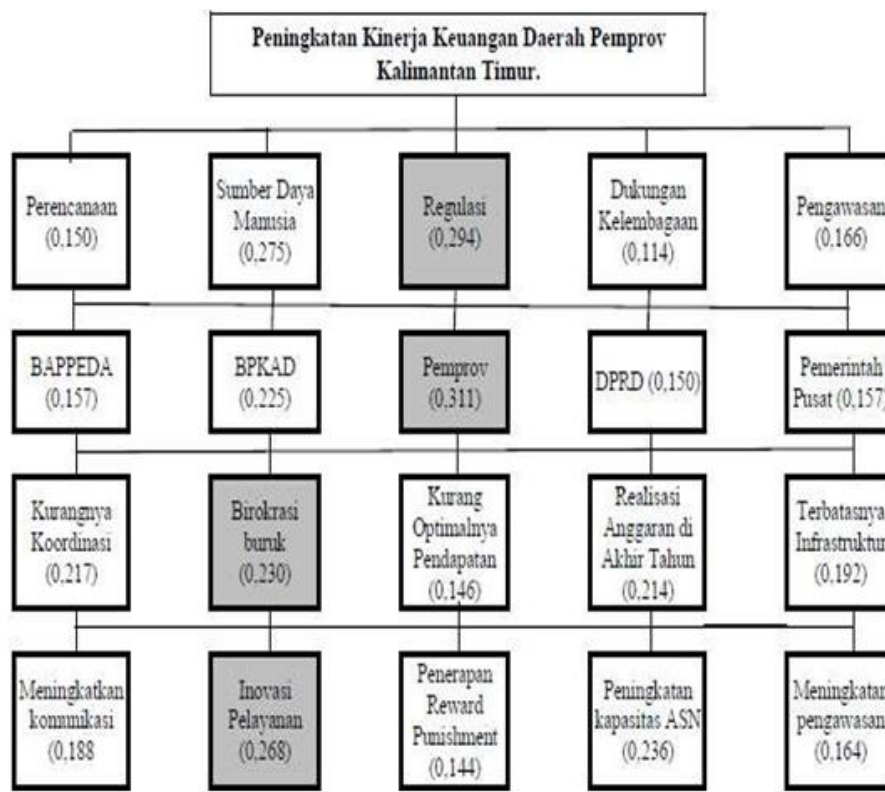
Goal

Faktor

Aktor

Kendala

Alternatif Strategi



Sumber: Data primer (2017), diolah

Gambar 2. Struktur dan nilai hirarki AHP strategi peningkatan kinerja keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

**Implikasi Kebijakan**

- Melakukan Inovasi Pelayanan

Rancangan perencanaan kegiatan dalam strategi inovasi dalam meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan pada Tabel 1.



Tabel 1. Rancangan perencanaan kegiatan strategi inovasi dan pelayanan

Kegiatan	Tahun					Pelaksana
	I	II	III	IV	V	
1. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di seluruh SAMSAT di Kalimantan Timur	√	√	√			Bapenda, BPKAD, Ditlantas Polda Kalimantan Timur, Bappeda
2. Pengembangan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai-nilai <i>service excellent</i> pegawai SKPD/UPT/Perusda/BLUD yang berkaitan dengan PAD	√					BPSDM Prov Kalimantan Timur, BPKAD, Bapenda, Perusda, BLUD dengan <i>benchmarking</i> BUMN & Himbara
3. Pengembangan Aplikasi <i>web</i> dan <i>mobile</i> untuk pembayaran Pajak Kendaraan bermotor dengan E-SAMSAT	√					Bapenda, Diskominfo, BPKAD, Ditlantas Polda Kalimantan Timur
4. Kerjasama dengan perbankan/ Pos/ minimarket agar dapat melakukan pembayara pajak kendaraan bermotor via ATM/ Kantor Pos/Minimarket	√					Bapenda, BPKAD, Ditlantas Polda Kalimantan Timur, Bank Kalimantan Timur, BUMN Perbankan (BRI, BNI, Mandiri, BTN), Kantor Pos, minimarket, Bappeda

Sumber: Data primer (2017), diolah

2. Peningkatan Kapasitas ASN dalam meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam strategi peningkatan kapasitas ASN dalam strategi peningkatan kapasitas ASN dijabarkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Rancangan perencanaan kegiatan strategi peningkatan kapasitas ASN

Kegiatan	Tahun					Pelaksana
	I	II	III	IV	V	
1. Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan OPD	√	√	√	√	√	BPKAD, BPSDM, BPKP, Kemenkeu
1. Mengembangkan pola kompetisi, kompetensidan <i>asssestment center</i> bagi ASN		√	√			BPSDM, BKD, Balitbangda, Universitas Mulawarman
3. Mengembangkan pengelolaan sistem informasi SDM/HRIS ( <i>Human Resources Information System</i> ) untuk Administrasi ASN, Diklat, kinerja pegawai, dll.		√				BPSDM, BKD, Balitbangda
4. Kaderisasi/mentoring pegawai		√				BPSDM, BKD, Balitbangda
5. Menciptakan budaya kerja & nilai-nilai kearifan budaya lokal sebagai pembentuk karakter ASN. <b>“Gawi Manuntung Waja Sampai Kaputing”</b> Bekerja keras sampai tuntas, dengan semangat baja hingga titik akhir.		√				BKD, BPSDM, DPRD, Pemprov Kalimantan Timur

Sumber: Data primer (2017), diolah

3. Meningkatkan Komunikasi dalam meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam strategi peningkatan komunikasi dalam strategi peningkatan komunikasi dijabarkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Rancangan perencanaan kegiatan strategi peningkatan komunikasi

Kegiatan	Tahun					Pelaksana
	I	II	III	IV	V	
1. Membentuk forum tematik dengan para stakeholder (TAPD, TEPRA, TPID, Bakohumas)			√	√		Biro Humas, DPRD, Diskominfo, BPKAD, KPwBI, BPS, Bulog, BUMN, Bappeda
2. Meningkatkan kerjasama informasi dengan media			√			Biro Humas, PPIID, media massa cetak/elektronik
3. Optimalisasi penggunaan Media Sosial untuk mendapatkan masukan dari stakeholder (youtube, facebook, twitter, WA, dll).			√			Biro Humas, Diskominfo, DPRD

Sumber: Data primer (2017), diolah

4. Meningkatkan Pengawasan  
Rancangan perencanaan kegiatan dalam strategi peningkatan pengawasan dalam

meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Rancangan perencanaan kegiatan strategi peningkatan pengawasan

Kegiatan	Tahun					Pelaksana
	I	II	III	IV	V	
1. Tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	√	√	√	√	√	SKPD, Inspektorat, BPKP, BPKAD, DPRD
2. Koordinasi penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	√	√	√	√	√	BPKAD, Inspektorat, BKD
3. Pengembangan <i>whistle blowing system</i>				√		Inspektorat, BPKAD, SKPD, Diskominfo, DPRD
4. Membangun zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)			√	√		SKPD, Inspektorat, BPKP, BPKAD, DPRD
5. Peningkatan sinergi satgas SABER PUNGLI			√	√		Inspektorat, Kejaksaan, Kepolisian, LSM, DPRD, LSM
6. Mengupayakan peningkatan pengawasan penerimaan dari Dana Perimbangan, terutama yang bersumber dari dana bagi hasil melalui kegiatan rekonsiliasi dan penelusuran bukti setor PNPB (royalti) yang belum teridentifikasi			√	√		BPKAD, Distamben, Kemenkeu, Bank Persepsi, Inspektorat, DPRD

Sumber: Data primer (2017), diolah

5. Penerapan *Reward* dan *Punishment*  
Rancangan perencanaan kegiatan dalam strategi penerapan reward dan punishment dalam meningkatkan kinerja

keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Rancangan perencanaan kegiatan strategi penerapan *reward* dan *punishment*

Kegiatan	Tahun					Pelaksana
	I	II	III	IV	V	
1. Pemberian penghargaan berupa piagam dan pelayanan prioritas di BPKAD bagi SKPD yang mampu melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan rencana.					√	SKPD, BPKAD
2. Pengembangan Aplikasi berbasis web untuk memantau penyerapan anggaran secara <i>real time</i>					√	BPKAD, Diskominfo

Sumber: Data primer (2017), diolah

**SIMPULAN DAN SARAN**

**Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang disajikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Strategi Peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terutama dalam hal peningkatan PAD berdasarkan hasil analisis AHP sesuai urutan prioritasnya yaitu (1) inovasi pelayanan (2) peningkatan kapasitas ASN, (3) peningkatan komunikasi (4) peningkatan pengawasan, dan (5) penerapan reward dan punishment. Inovasi menjadi sesuatu yang mutlak dalam pelayanan publik, sebab apapun kebutuhan masyarakat, pemerintah harus merespon dengan cepat dan

tepat. Inovasi juga diharapkan menjadi salah satu cara untuk mendorong percepatan pembangunan secara efektif dan efisien. Inovasi dimaksud bukan hanya berhubungan dengan teknologi dan informasi saja, tetapi juga inovasi dalam peningkatan kualitas SDM, pembuatan standar, serta kerjasama maupun benchmarking dengan institusi lain untuk memberikan perspektif yang berbeda.

**Saran**

Berdasarkan hasil kajian, beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangannya. Optimalisasi



- penerimaan daerah dari pajak dan retibusi harus terus dilakukan dan memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif non pertambangan di daerah.
2. Mengoptimalkan koordinasi antara Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta meningkatkan upaya *transfer knowledge* kepada seluruh aparatur di Provinsi dan Kabupaten/Kota terutama yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.
  3. Membangun kemitraan partisipatif dengan lintas perangkat daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dalam bidang perekonomian dan keuangan daerah sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hasan MI. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor (ID) : Ghalia Indonesia.
- Jufrizal, Sujianto. 2013. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Administrasi Pembangunan*. 1 (2): 101-218.
- Koentjoroningrat. 1983. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta (ID): PT. Gramedia.
- OECD. 2011. *Regulatory Policy and Governance: Supporting Economic Growth and Serving the Public Interest*. OECD Publishing: 2011.
- Permadi B. (1992). *AHP*. Pusat Antar Universitas, Universitas Indonesia. Jakarta: Indonesia.
- Rangkuti F. 2016. Teknik Membedah Kasus Bisnis. Analisis SWOT. Jakarta (ID): PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sianturi A, Sjamsuddin S, Domai T. 2015. Peran Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah (studi pada Dinas Pendapatan Kota Batu). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 2 (3): 557-563.

- Silalahi U. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung (ID): PT Refika Aditama.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung (ID): Alfabeta.
- Sukirno S. 1996. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Cetakan Keenam. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Tarigan R. 2004. *Ekonomi Regional (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta (ID): PT. Bumi Aksara.
- Wenny, Cherry D. 2012. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Forum Bisnis dan Kewirausahaan. Jurnal Ilmiah STIE MDP*. 2(1).

